

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu bangsa dan menunjukkan bahwa suatu negara telah berhasil meningkatkan ekonominya. Pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu kerataan pelaksanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan pembangunan menurut Nufia (2013) yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya difokuskan ke dalam satu bidang akan tetapi di segala bidang termasuk yang dilakukan di daerah.

Pembangunan daerah terjadi karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya masing-masing termasuk pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerahnya. Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diharapkan mampu

memberikan kemandirian bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya di segala bidang termasuk pemungutan pajak daerah masing-masing daerah.

Pemungutan pajak daerah diatur oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan Pemerintah Pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu dan kualitas pembangunan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perekonomian dan peran serta masyarakat. Peningkatan mutu dan pembangunan daerah membutuhkan sumber-sumber dana yang berasal dari pusat maupun daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sumber Penerimaan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun karena menjadi andalan bagi pembiayaan di tahun mendatang (Nufia, 2013). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh daerah sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh sektor Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting karena digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan sumber Pajak Daerah yang benar akan meningkatkan jumlah penerimaan daerah dan menambah kas daerah. Hal tersebut terlepas dari peran daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah diberbagai sektor sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah merupakan pajak yang terdiri dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2011).

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota yang memiliki potensi dalam meningkatkan PAD terutama di provinsi-provinsi yang memiliki daerah wisata yang menarik di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di pulau Jawa bagian tengah yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki banyak julukan seperti Kota Pelajar, Kota Kuliner dan Kota Wisata, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan oleh provinsi tersebut baik itu di kabupaten maupun kota. Pembangunan dilakukan di segala bidang termasuk pemungutan Pajak Daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak tempat-tempat wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan banyak dikembangkan bisnis perhotelan di kabupaten/kota tersebut, yang berperan sebagai tempat penginapan dan penyedia akomodasi bagi wisatawan. Berkembangannya bisnis perhotelan di kabupaten/kota diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Pajak Daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di provinsi tersebut.

Selain terkenal dengan objek wisatanya di kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terkenal dengan aneka kulinernya.

Wisatawan yang datang tidak hanya mengunjungi tempat wisata akan tetapi juga mencicipi aneka kuliner yang ada di setiap kabupaten/kota provinsi tersebut. Hal tersebut menyebabkan banyak bermunculan bisnis restoran yang didirikan di provinsi tersebut. Semakin berkembangnya bisnis restoran diharapkan dapat menambah pendapatan dari Pajak Restoran sehingga dapat menambah PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkembangnya pariwisata, pendidikan dan industri yang ada di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menyebabkan banyak bermunculan media promosi atau iklan di kabupaten/kota tersebut terutama pemasangan reklame. Pemasangan reklame dilakukan dengan tujuan untuk menarik masyarakat maupun wisatawan akan produk barang atau jasa yang ditawarkan agar berminat untuk menggunakannya. Peningkatan pemasangan reklame yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak reklame sehingga dapat menambah PAD di provinsi tersebut.

Penelitian yang membahas tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah dilakukan oleh Krisna Meilanda Cahyani (2013) yang berjudul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis". Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu selama sepuluh tahun yaitu pada tahun 2002-2012 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu penelitian tentang Pajak Restoran dan Pajak Reklame juga dilakukan oleh Mawar Dwi Putratnty (2008) dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu selama enam tahun yaitu tahun 2002-2007 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Putratnty (2008) adalah Pajak Reklame dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel selama delapan tahun yaitu pada tahun 2006-2013. Sedangkan variabel penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani (2013) adalah Pajak Hotel dan Restoran dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putratnty (2008) variabel penelitiannya adalah Pajak Reklame dan Restoran dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Melihat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki berbagai tempat wisata yang menarik serta memiliki aneka kuliner yang berbeda menyebabkan banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga banyak hotel dan restoran yang dibangun di kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Selain

itu, banyaknya promosi melalui Reklame yang dilakukan oleh berbagai pihak menyebabkan D.I Yogyakarta memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pemungutan Pajak Daerah terutama Pajak Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan latar belakang tersebut peneliti menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta).

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame di kabupaten/kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Periode pengamatan selama delapan tahun yaitu 2006-2013 pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta ?

2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta ?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk meningkatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.



2. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan ilmu akuntansi terutama tentang Pajak Daerah.